

KOORDINASI PEMERINTAHAN DALAM MENYELESAIKAN MOBILISASI ANGKUTAN TAMBANG BATU BARA DI PROVINSI JAMBI

GILANG KURNIAWAN SIREGAR
NPP. 31.0196

*Asdaf Kota Jambi, Provinsi Jambi
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah Fakultas Manajemen Pemerintahan
email : jambigilang712@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si

ABSTRACT

Background (GAP): *The thesis, titled "Government Coordination in Completing the Mobilization of Coal Mining Transport in Jambi Province," addresses the significant issue of coal mining transport mobilization in Jambi Province. Effective government coordination is essential to manage this mobilization efficiently, yet challenges persist, necessitating a thorough analysis of the coordination mechanisms in place. **Objective:** This research aims to determine and analyze the extent and effectiveness of government coordination in addressing the mobilization of coal mining transportation in Jambi Province. Additionally, it seeks to identify and analyze the supporting and inhibiting factors affecting this coordination, and propose strategies to overcome the inhibiting factors. **Method:** The research employs a qualitative approach with descriptive methods and an inductive perspective. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The theoretical framework is based on the management process, focusing on coordination according to Taliziduhu Ndraha's concept, which encompasses seven aspects: communication, awareness of the importance of coordination, participant competence, agreement and commitment, determination of agreement by coordinating parties, coordination incentives, and feedback. **Results/Findings:** The study concludes that government coordination in managing the mobilization of coal mining transportation in Jambi Province is generally effective, although there are some deficiencies. Both internal and external factors within the Jambi Provincial Government influence the coordination process. Supporting factors facilitate the coordination, while inhibiting factors pose challenges that need to be addressed. **Conclusion:** To address the inhibiting factors, efforts have been made to optimize the performance of coordinating implementers, emphasizing smart and sincere work. Innovations have been introduced to enhance the development and resolution of coal mine transport mobilization issues.*

Keywords: *Coordination, Regional Government, Coal*

ABSTRAK

Latar Belakang (GAP): Skripsi ini berjudul "Koordinasi Pemerintahan Dalam Menyelesaikan Mobilisasi Angkutan Tambang Batu Bara Di Provinsi Jambi". Penelitian ini mengkaji isu penting mengenai mobilisasi angkutan tambang batu bara di Provinsi Jambi, yang membutuhkan koordinasi

pemerintahan yang efektif untuk mengelola mobilisasi tersebut secara efisien. Namun, masih terdapat tantangan yang perlu dianalisis lebih lanjut. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi pemerintahan dalam menyelesaikan mobilisasi angkutan tambang batu bara di Provinsi Jambi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat koordinasi pemerintahan serta upaya mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah proses manajemen yang mencakup konsep koordinasi menurut Taliziduhu Ndraha, yang mencakup tujuh aspek: ada tidaknya komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan dan komitmen, penetapan kesepakatan oleh pihak yang berkoordinasi, insentif koordinasi, dan feedback. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa koordinasi pemerintahan dalam menyelesaikan mobilisasi angkutan tambang batu bara di Provinsi Jambi sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa kekurangan. Faktor pendukung dan penghambat proses koordinasi berasal dari internal dan eksternal Pemerintah Provinsi Jambi. **Kesimpulan:** Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat adalah mengoptimalkan kinerja pelaksana koordinasi dengan komitmen kerja ikhlas dan cerdas serta melakukan inovasi yang dapat berguna bagi perkembangan penyelesaian permasalahan mobilisasi angkutan tambang batu bara.

Kata Kunci: Koordinasi, Pemerintah Daerah, Batu Bara

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Jambi, sebuah daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama batubara, telah menjadi salah satu motor penggerak ekonomi regional di Indonesia. Potensi batubara yang melimpah dengan cadangan mencapai ratusan juta ton tersebar di beberapa kabupaten, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Setiap tahunnya, sektor pertambangan batubara di Provinsi Jambi mampu mencatat penjualan senilai triliunan rupiah, memainkan peran penting dalam pendapatan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Meskipun begitu, pertumbuhan sektor batubara ini tidak datang tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah terkait dengan pengangkutan batubara. Truk-truk pengangkut batubara yang berlebihan muatan sering kali menggunakan jalan umum, menyebabkan kerusakan serius pada infrastruktur jalan. Infrastruktur yang rusak bukan hanya menambah biaya perbaikan untuk pemerintah daerah, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan. Selain itu, dampaknya juga dirasakan oleh masyarakat lokal dalam bentuk kecelakaan lalu lintas yang meningkat dan penurunan kualitas hidup akibat kemacetan yang sering terjadi.

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Provinsi Jambi telah mengeluarkan beberapa regulasi, seperti Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2012 yang menetapkan jalur khusus atau pengangkutan batubara melalui sungai. Namun, implementasi dari kebijakan ini tidak berjalan mulus. Tantangan

yang dihadapi termasuk pembangunan infrastruktur sungai yang terkendala dan resistensi dari pelaku usaha yang lebih cenderung memilih menggunakan jalan umum untuk alasan efisiensi dan biaya.

Dampak sosial dan lingkungan dari pengangkutan batubara juga tidak bisa diabaikan. Protes masyarakat terhadap dampak lingkungan, blokade jalan oleh masyarakat lokal, serta konflik antara pelaku usaha dan masyarakat menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan serta kebutuhan sosial masyarakat lokal.

Tantangan lainnya adalah dalam penegakan hukum terhadap pengangkutan batubara yang melanggar regulasi. Resistensi dari pelaku usaha, ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan regulasi secara efektif, dan koordinasi yang kurang baik antara berbagai tingkatan pemerintahan menjadi hambatan utama. Ini menunjukkan perlunya penguatan sistem koordinasi antarinstansi terkait, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten, hingga kota, untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.

Untuk memastikan pengelolaan batubara yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi ekonomi serta lingkungan, langkah-langkah strategis harus diambil secara bersama-sama. Ini mencakup peningkatan infrastruktur transportasi yang memadai, penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelanggaran, serta penguatan koordinasi antarinstansi untuk memastikan implementasi peraturan yang efektif dan berkelanjutan. Hanya dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, Provinsi Jambi dapat mengatasi tantangan ini sambil memanfaatkan potensi batubara secara berkelanjutan untuk pembangunan yang inklusif bagi masyarakatnya.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Setelah mengeksplorasi berbagai aspek kesenjangan dan masalah yang timbul dari mobilisasi batu bara di Provinsi Jambi, ada beberapa permasalahan yang menjadi fokus utama untuk diambil tindakan penyelesaiannya. Pertama, adalah masalah kemacetan yang terjadi secara rutin di jalan umum akibat lalu lintas truk pengangkut batu bara yang padat. Kemacetan ini tidak hanya mengganggu mobilitas penduduk lokal tetapi juga mengakibatkan penurunan produktivitas ekonomi dan kualitas hidup warga sehari-hari. Penyelesaian yang tepat perlu mempertimbangkan pengaturan lalu lintas yang lebih efektif, termasuk pengalihan rute untuk truk pengangkut batu bara serta peningkatan infrastruktur jalan yang mampu menampung beban yang lebih berat.

Kedua, infrastruktur jalan dan bangunan yang rusak akibat penggunaan berlebihan dan tidak sesuai dengan kapasitas jalan menjadi masalah serius lainnya. Jalan yang rusak tidak hanya meningkatkan biaya perbaikan infrastruktur publik bagi pemerintah daerah, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan. Pendekatan perbaikan infrastruktur yang berkelanjutan diperlukan, termasuk alokasi anggaran yang memadai dan pemantauan yang ketat terhadap pemeliharaan jalan yang sesuai dengan standar teknis.

Ketiga, kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi karena padatnya kendaraan, termasuk truk pengangkut batu bara, menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap keselamatan publik. Hal ini menuntut penegakan hukum yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih baik terhadap kondisi kendaraan dan perilaku pengemudi. Sanksi yang tegas harus diterapkan terhadap pelanggar untuk mencegah kecelakaan lalu lintas yang dapat merugikan nyawa dan harta benda masyarakat setempat.

Dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi ketiga masalah utama ini, diharapkan Provinsi Jambi dapat mereduksi dampak negatif mobilisasi batu bara terhadap infrastruktur, lingkungan, dan keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Perlu kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan masyarakat untuk mencapai solusi yang berkelanjutan dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi di daerah tersebut.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait dengan implementasi kebijakan transportasi angkutan batu bara dan dampaknya adalah sebagai berikut:

1. Nariendra dan Juanita (2023) mengkaji implementasi kebijakan operasional truk overloading di Provinsi Jambi, yang mengatur pembatasan beban truk batu bara dan pengaturan waktu operasional untuk mengurangi dampak lingkungan dan memperbaiki pelayanan jalan. Studi ini menyoroti polemik dan tantangan dalam penerapan kebijakan ini terhadap kesejahteraan sopir truk dan pengguna jalan umum (Nariendra & Juanita, 2023).
2. Citra et al. (2021) dalam studi mereka tentang kebijakan transportasi angkutan batu bara di Provinsi Jambi, menunjukkan bagaimana kebijakan ini berperan dalam mendukung perkembangan ekonomi daerah. Mereka menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan ini dan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya (Citra et al., 2021).
3. Wibisono (2011) membahas prediksi jumlah emisi CO₂ dari kegiatan transportasi, khususnya kereta api yang sering digunakan untuk angkutan batu bara. Studi ini penting dalam konteks mengukur dampak lingkungan dari transportasi batu bara dan upaya teknologi untuk mengurangi emisi (Wibisono, 2011).
4. Wijaya et al. (2014) melakukan penelitian tentang penentuan tarif angkutan barang moda kereta api jalur Padang-Solok, yang mencakup juga angkutan batu bara. Mereka menggunakan metode ATP dan WTP untuk menentukan tarif yang adil dan berkelanjutan dalam mendukung infrastruktur dan ekonomi daerah (Wijaya et al., 2014).
5. Pratama dan Damanik (2021) mengkaji pengaruh penyertaan modal daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batu Bara. Studi ini menunjukkan kontribusi penyertaan modal terhadap peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam konteks pertambangan batu bara (Pratama et al., 2021).
6. Alayubi (2023) mengungkap dominasi oligarki sumber daya alam, khususnya industri batu bara di Indonesia, dan pengaruhnya terhadap kebijakan pemerintah. Studi ini penting untuk memahami dinamika politik dan ekonomi dalam industri batu bara selama periode pemerintahan Joko Widodo (Alayubi, 2023).
7. Satoto dan Nasution (2019) memfokuskan pada kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara. Mereka meneliti implementasi UU No. 23 Tahun 2014 dan hubungannya dengan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam pengawasan dampak lingkungan dari kegiatan tambang (Satoto & Nasution, 2019).
8. (Lahagu et al., 2023) mengkaji kebijakan pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi alternatif di Indonesia. Studi ini mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam implementasi kebijakan energi nasional.
9. (Dewa et al., 2023) melakukan analisis tentang kebijakan perlindungan lingkungan hidup dalam pengangkutan batu bara di Kalimantan Timur. Mereka mengevaluasi efektivitas kebijakan ini dalam mengurangi dampak lingkungan dari industri pertambangan.

10. (Lubis, 2022) membahas strategi pengelolaan transportasi batu bara untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Studi ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan infrastruktur dan regulasi yang mendukung pengelolaan transportasi batu bara yang lebih baik.

Setiap penelitian tersebut memberikan pandangan yang berbeda-beda namun saling terkait tentang implementasi kebijakan transportasi angkutan batu bara dan dampaknya, dari aspek lingkungan, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Dalam konteks kebaruan ilmiah, penelitian yang terkait dengan implementasi kebijakan operasional truk overloading di Provinsi Jambi menawarkan kontribusi penting. Studi ini tidak hanya mencakup analisis dampak kebijakan terhadap para stakeholder, tetapi juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini memberikan rekomendasi konkret untuk memecahkan masalah, seperti fasilitasi yang lebih baik terhadap pemilik truk dan sopir untuk menentukan setoran yang adil berdasarkan Biaya Operasi Kendaraan (BOK). Selain itu, studi ini juga mengadvokasi perluasan kapasitas jalan dan penambahan kantong parkir untuk mengurangi dampak negatif dari parkir truk di sepanjang jalan, yang merupakan masalah krusial dalam pengelolaan transportasi angkutan batu bara di wilayah tersebut.

Di samping itu, penelitian tentang kebijakan transportasi angkutan batu bara di Provinsi Jambi juga menyoroti isu-isu ekonomi dan sosial yang kompleks. Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa implementasi kebijakan transportasi dapat memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan sosial masyarakat. Analisis kebijakan seperti yang dilakukan dalam penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana regulasi pemerintah dapat mempengaruhi dinamika ekonomi regional, termasuk distribusi pendapatan dan keseimbangan sosial antarstakeholder yang terlibat dalam industri batu bara.

Selain itu, penelitian tentang emisi CO₂ dari transportasi kereta api, khususnya yang terkait dengan angkutan batu bara, menambah pemahaman kita tentang dampak lingkungan dari infrastruktur transportasi. Estimasi CO₂ yang dihasilkan oleh kereta api adalah salah satu kontribusi utama dari studi ini. Hal ini penting karena pemanasan global dan perubahan iklim menjadi isu global yang mendesak untuk ditangani, dan penelitian ini memberikan landasan ilmiah yang kuat untuk mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan dalam pengelolaan transportasi batu bara di Indonesia.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana koordinasi Pemerintah Provinsi Jambi dalam menangani masalah mobilisasi angkutan batu bara. Penelitian ini akan menganalisis efektivitas koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam mengatur transportasi batu bara di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam koordinasi pemerintahan yang mempengaruhi kelancaran operasional transportasi batu bara di Provinsi Jambi.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam koordinasi pemerintahan terkait mobilisasi angkutan batu bara di Provinsi Jambi. Dengan memahami hambatan-hambatan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas koordinasi dalam mengelola transportasi batu bara, serta memperbaiki kondisi infrastruktur dan regulasi yang mendukung aktivitas ini secara berkelanjutan.

II. METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena memberikan fleksibilitas untuk memahami fenomena yang kompleks seperti koordinasi pemerintahan dalam menyelesaikan mobilisasi angkutan batu bara di Provinsi Jambi. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konteks, proses, dan dinamika yang terlibat dalam koordinasi tersebut, melalui interaksi langsung dengan para informan dan studi lapangan (Murdiyanto, 2020).

Penelitian kualitatif ini didasarkan pada pendekatan induktif, di mana data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk mengembangkan teori atau model yang relevan dengan situasi yang dihadapi. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan untuk memahami secara menyeluruh tentang bagaimana koordinasi pemerintahan berlangsung dalam konteks transportasi batu bara di Provinsi Jambi, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses tersebut (Rijali, 2019).

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan (field research) dengan melakukan observasi langsung, wawancara mendalam (in-depth interview), dan analisis dokumen terkait. Studi lapangan akan dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik koordinasi pemerintahan yang terjadi, sementara wawancara mendalam akan dilakukan dengan pihak terkait seperti pejabat pemerintah daerah, pengusaha batu bara, dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan pandangan mereka tentang proses koordinasi tersebut (Hasibuan et al., 2022).

Analisis data kualitatif akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif, di mana data-data yang terkumpul akan diorganisir, diinterpretasikan, dan dijelaskan secara sistematis. Teknik analisis seperti tema-tema (thematic analysis) akan digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema utama dari data wawancara dan observasi yang relevan dengan tujuan penelitian (Sari sasi gendro, 2022).

Dengan pendekatan dan metode ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika koordinasi pemerintahan dalam konteks mobilisasi angkutan batu bara di Provinsi Jambi, serta menyediakan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas koordinasi tersebut (Thabroni, 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Koordinasi Pemerintahan Dalam Mengatasi Mobilisasi Batu Bara Di Provinsi Jambi

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi bertanggung jawab untuk mendukung Gubernur dalam urusan pemerintahan di bidang perhubungan dan tugas pembantuan

sesuai dengan regulasi yang berlaku. Koordinasi pemerintahan dalam menangani mobilisasi batu bara di Provinsi Jambi dijabarkan menggunakan Konsep Koordinasi yang diperkenalkan oleh Talizuhu Ndraha (2015:297). Informasi yang dikumpulkan dari berbagai pihak penting, termasuk Gubernur Jambi, Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintah dan Kesra, Kepala Biro Perekonomian, serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi, menjadi landasan utama dalam analisis koordinasi ini. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan bahwa informasi yang akurat dan tepat waktu merupakan kunci utama dalam menyelesaikan koordinasi mobilisasi batu bara.

Ada Tidaknya Informasi

Menurut Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, informasi yang penting untuk menyelesaikan koordinasi mobilisasi batu bara meliputi infrastruktur transportasi, regulasi lingkungan, serta standar keselamatan dan kesehatan kerja. Adanya koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan tambang, operator transportasi, dan masyarakat setempat juga diakui sebagai faktor krusial dalam proses ini.

Ada Tidaknya Alur Komunikasi

Alur komunikasi antara stakeholder dalam menangani masalah batu bara di Provinsi Jambi berlangsung dengan lancar, sesuai yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral. Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Provinsi Jambi menekankan pentingnya komunikasi yang efektif untuk memastikan respons cepat terhadap arahan dari Gubernur.

Ada Tidaknya Teknologi Informasi

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jambi menyatakan bahwa meskipun terdapat upaya untuk mengembangkan sistem informasi terpadu terkait masalah batu bara, teknologi informasi yang tersedia masih terbatas. Hal ini menunjukkan potensi untuk lebih mengintegrasikan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dalam koordinasi mobilisasi batu bara di masa depan.

Penetapan Kesepakatan Oleh Pihak yang Berkoordinasi

Setelah proses koordinasi antarpihak terjadi, tahap selanjutnya adalah penetapan kesepakatan yang mengikat. Kesepakatan ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam koordinasi memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan tugas mereka tanpa mengorbankan kepentingan lain. Kesepakatan ini biasanya dihasilkan dari rapat-rapat koordinasi dan disepakati bersama untuk mencapai solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

Ada Tidaknya Bentuk Kesepakatan

Dalam proses wawancara yang dilakukan, terdapat sejumlah informan yang memberikan kontribusi penting terkait bentuk kesepakatan yang telah dibuat. Informasi dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menunjukkan bahwa kesepakatan utama yang dihasilkan adalah Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Batu Bara di Provinsi Jambi. Instruksi ini diterbitkan untuk memastikan stabilitas regional dalam distribusi logistik, keamanan, dan koordinasi lintas daerah dalam konteks Pemilu Serentak 2024 di Provinsi Jambi.

Ada Tidaknya Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kesepakatan tersebut juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Dari hasil wawancara dengan Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jambi, terungkap bahwa evaluasi dan identifikasi terus dilakukan untuk menentukan langkah-langkah konkret dalam melaksanakan pengawasan dan pengamanan transportasi batu bara. Ini mencakup alokasi sumber daya yang memadai dan peningkatan koordinasi dengan semua pihak terkait, untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif.

Insentif Koordinasi

Salah satu aspek penting dari koordinasi adalah pemberian insentif kepada pihak yang terlibat dalam menjalankan tugas sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Insentif ini bertujuan untuk mendorong motivasi dan kinerja optimal dalam mencapai tujuan bersama, serta sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dalam menjalankan tugas.

Ada Tidaknya Insentif Bagi Pelaksana Kegiatan

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pihak terkait, terungkap bahwa ada sistem insentif bagi pelaksana kegiatan yang berkinerja baik. Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Provinsi Jambi menjelaskan bahwa insentif tersebut dapat berupa tunjangan kinerja, bonus, atau pengakuan atas kinerja yang luar biasa. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaksana kegiatan merasa diapresiasi dan termotivasi untuk menjalankan tugas mereka dengan baik.

3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Koordinasi Pemerintahan dalam Menyelesaikan mobilisasi tambang batu bara di provinsi jambi

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam koordinasi antara Dinas Perhubungan Provinsi Jambi dan lembaga-lembaga terkait dalam menangani mobilisasi tambang batu bara di wilayah tersebut. Faktor pendukung internal terutama mencakup kekompakan antara berbagai instansi pemerintah yang terlibat, seperti yang diungkapkan oleh Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Provinsi Jambi. Mereka menekankan pentingnya kerjasama dan komitmen bersama untuk mendukung visi misi Gubernur dalam menyelesaikan masalah batu bara, yang tercermin dalam kegiatan seperti Apel Gabungan Tim Satgaswas Gakkum.

Di sisi lain, faktor pendukung eksternal melibatkan dukungan dari pengusaha tambang batu bara yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Mereka mendukung upaya pemerintah dengan komitmen untuk membangun jalan khusus angkutan batu bara, sesuai arahan dan instruksi yang diberikan oleh pemerintah daerah. Forum bersama seperti yang tergambar dalam Gambar 4.20 menunjukkan adanya kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan infrastruktur transportasi terkait.

Namun demikian, ada pula faktor penghambat yang harus diatasi. Faktor penghambat internal termasuk kurangnya komunikasi dan informasi yang cukup antar stakeholder pemerintah, seperti yang disampaikan dalam wawancara dengan Asisten Pemerintah dan Kesra. Hal ini dapat menghambat efisiensi dalam koordinasi dan pelaksanaan tugas. Di sisi eksternal, masalah utama adalah perilaku

tidak patuh dari sebagian sopir batu bara yang mengangkut melebihi kapasitas maksimum atau menggunakan kendaraan pribadi, yang dapat membahayakan keselamatan dan mengganggu ketertiban lalu lintas, seperti yang terlihat dalam Gambar 4.22.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dalam menangani mobilisasi tambang batu bara di Provinsi Jambi, disarankan untuk terus memperkuat komunikasi antar instansi pemerintah dan pihak swasta, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan aturan, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk memfasilitasi pertukaran informasi secara lebih efisien dan akurat.

3.3 Upaya Mengatasi Factor - Faktor Penghambat Koordinasi Pemerintahan Dalam Menyelesaikan Mobilisasi Batu Bara Di Provinsi Jambi

Pemerintah Provinsi Jambi menghadapi beberapa kendala dalam koordinasi mobilisasi batu bara, termasuk dalam upaya internal. Salah satu strategi langsung yang dilakukan adalah dengan mengadakan pertemuan rutin. Dalam wawancara dengan Asisten Pemerintah dan Kesra Sekda Provinsi Jambi, disebutkan bahwa mereka secara aktif menggelar pertemuan untuk mendiskusikan kendala lapangan, mengevaluasi situasi, dan mencari solusi bersama. Ini adalah langkah kritis dalam memastikan koordinasi internal yang efektif di antara berbagai instansi terkait seperti Dinas Perhubungan dan Biro Perekonomian.

Selain upaya internal, Pemerintah Provinsi Jambi juga mengambil tindakan langsung eksternal. Ini termasuk memberlakukan sanksi langsung kepada pelanggar, seperti melakukan tilang kepada sopir truk batu bara yang melanggar aturan lalu lintas. Langkah ini menunjukkan komitmen untuk menegakkan regulasi dan menjaga disiplin di lapangan, sehingga memberikan efek jera bagi pelaku yang melanggar ketentuan operasional.

Di samping langkah-langkah langsung, terdapat pula upaya tidak langsung yang dilakukan secara internal. Misalnya, melakukan sosialisasi secara teratur kepada pengusaha tambang dan sopir truk batu bara melalui instansi terkait dan melibatkan pihak kepolisian dalam tim koordinasi. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan kompleksitas masalah yang dihadapi, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya mematuhi regulasi yang ada.

Upaya tidak langsung secara eksternal juga dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai dampak negatif dari masalah batu bara, seperti kerusakan jalan dan risiko kecelakaan. Dengan cara ini, Pemerintah Provinsi Jambi berupaya membangun dukungan publik dan kesadaran akan pentingnya menjaga ketertiban dalam mobilisasi batu bara.

Secara keseluruhan, langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi tidak hanya fokus pada penegakan aturan secara langsung, tetapi juga aktif dalam membangun koordinasi internal yang efektif dan meningkatkan kesadaran publik untuk menciptakan lingkungan operasional yang lebih teratur dan aman dalam mobilisasi batu bara di provinsi tersebut.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi pemerintah, seperti Dinas Perhubungan, dengan berbagai stakeholders terkait di Provinsi Jambi berjalan relatif baik. Hasil

wawancara menunjukkan bahwa informasi yang akurat dan tepat waktu menjadi kunci keberhasilan koordinasi, sesuai dengan konsep yang diperkenalkan sebelumnya oleh Talizuhu Ndraha (2015). Ini sejalan dengan penelitian Nariendra dan Juanita (2023) yang juga menyoroti pentingnya implementasi kebijakan operasional terkait truk overloading dalam konteks yang serupa. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa ada tantangan yang signifikan terkait kurangnya teknologi informasi yang memadai, sedangkan penelitian terdahulu cenderung lebih fokus pada aspek regulasi dan penegakan hukum.

Faktor pendukung dan penghambat dalam koordinasi pemerintahan juga menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Terdapat kesamaan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa dukungan dari sektor swasta dan komitmen bersama antara pemerintah dan perusahaan tambang sangat penting dalam meningkatkan infrastruktur dan menyelesaikan masalah logistik. Namun, faktor penghambat seperti kurangnya komunikasi antar stakeholder dan perilaku tidak patuh dari pelaku lapangan tetap menjadi tantangan, mirip dengan yang diidentifikasi dalam penelitian sebelumnya.

Upaya konkret yang dilakukan pemerintah Provinsi Jambi untuk mengatasi faktor penghambat, seperti pertemuan rutin dan penerapan sanksi langsung kepada pelanggar, juga merupakan langkah yang sejalan dengan temuan sebelumnya. Penelitian-penelitian terdahulu juga menyoroti pentingnya langkah-langkah tegas untuk menegakkan aturan, meskipun fokusnya mungkin berbeda. Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini menguatkan temuan bahwa strategi pengawasan yang ketat dan pembangunan kesadaran publik tetap krusial dalam mengelola mobilisasi batu bara di wilayah ini.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang berharga dengan menyoroti bagaimana koordinasi pemerintah dalam menghadapi mobilisasi batu bara di Provinsi Jambi dapat ditingkatkan, sambil membandingkannya dengan temuan-temuan yang telah ada sebelumnya. Langkah-langkah lanjutan untuk meningkatkan efisiensi koordinasi, termasuk penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih dan penguatan komunikasi antar stakeholder, dapat menjadi fokus untuk mendukung pengembangan kebijakan lebih lanjut di masa depan.

3.5 Diskusi Temuan Menarik

Berbagai temuan menarik muncul dari penelitian ini yang patut diperbincangkan. Pertama, terungkap bahwa koordinasi antarinstansi pemerintah dan pihak swasta di Provinsi Jambi masih menghadapi tantangan yang signifikan, meskipun upaya-upaya telah dilakukan untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitasnya. Meskipun ada kerjasama yang solid di antara berbagai lembaga pemerintah seperti Dinas Perhubungan dan Biro Perekonomian, masih ada kekurangan dalam hal komunikasi yang efektif dan penggunaan teknologi informasi yang optimal untuk memfasilitasi pertukaran informasi yang cepat dan akurat.

Kedua, penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya penegakan aturan dan sanksi terhadap pelanggar aturan dalam mobilisasi batu bara. Langkah-langkah seperti pemberian tilang kepada sopir truk yang melanggar aturan lalu lintas menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga ketertiban dan disiplin di lapangan. Namun demikian, masih ditemukan masalah seperti pelanggaran kapasitas

muatan yang berpotensi merusak jalan dan membahayakan keselamatan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk rekomendasi ke depan dalam meningkatkan implementasi kebijakan dan koordinasi di Provinsi Jambi untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan dalam mobilisasi batu bara.

IV. KESIMPULAN

Untuk menyimpulkan hasil penelitian tentang koordinasi pemerintahan dalam mobilisasi tambang batu bara di Provinsi Jambi, beberapa poin kunci dapat ditekankan. Pertama, ditemukan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam transparansi dan komunikasi efektif terkait informasi mengenai angkutan batu bara, langkah-langkah seperti kolaborasi antarinstansi telah membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan pemahaman bersama. Namun, kurangnya integrasi teknologi informasi yang efektif masih menjadi hambatan signifikan dalam penanganan masalah ini.

Kedua, kesadaran akan pentingnya koordinasi terlihat kuat di kalangan pelaksana dan pejabat pemerintahan Provinsi Jambi. Kolaborasi yang terstruktur dan implementasi koordinasi dalam job desk masing-masing telah membantu mengelola masalah yang kompleks terkait industri batu bara dengan lebih efektif. Hal ini juga tercermin dalam kesepakatan yang dibuat antara pemerintah daerah, industri, dan masyarakat, menunjukkan komitmen untuk mencapai solusi berkelanjutan.

Ketiga, meskipun terdapat beberapa faktor pendukung seperti komitmen stakeholder dan dukungan eksternal dari perusahaan tambang, masih ada tantangan dalam bentuk penghambat internal seperti keterbatasan informasi dan permasalahan dalam pengawasan. Upaya langsung dan tidak langsung seperti evaluasi rutin, sosialisasi, serta penegakan aturan yang konsisten perlu terus ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan dari hasil kesepakatan dan mengatasi tantangan yang ada. Dengan demikian, langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan landasan yang lebih kuat untuk peningkatan manajemen transportasi batu bara di Provinsi Jambi ke depannya.

Keterbatasan Penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil. Pertama, keterbatasan pada sumber data yang tersedia dapat mempengaruhi kedalaman analisis terhadap faktor-faktor yang memengaruhi koordinasi pemerintahan dalam mobilisasi tambang batu bara di Provinsi Jambi. Selain itu, batasan dalam akses informasi terkait dengan kebijakan internal dan praktik operasional dari pihak-pihak yang terlibat juga mempengaruhi tingkat detail yang dapat dicapai dalam memahami dinamika koordinasi tersebut. Penelitian ini juga mempertimbangkan keterbatasan waktu yang mungkin mempengaruhi pengamatan langsung terhadap implementasi kebijakan dan dampak yang lebih luas dari kerjasama tersebut di lapangan. Dengan memahami keterbatasan ini, interpretasi yang lebih komprehensif dan akurat atas hasil penelitian dapat dilakukan untuk mendukung perbaikan lebih lanjut dalam manajemen angkutan batu bara di daerah tersebut.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk arah masa depan penelitian ini, ada beberapa hal yang perlu dieksplorasi lebih lanjut guna memperdalam pemahaman dan efektivitas dalam manajemen koordinasi pemerintahan terkait mobilisasi tambang batu bara di Provinsi Jambi. Salah

satunya adalah pengembangan metodologi penelitian yang lebih inklusif, termasuk penggunaan pendekatan kualitatif yang lebih mendalam untuk mengeksplorasi persepsi dan pengalaman langsung dari berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat fokus pada evaluasi dampak kebijakan yang lebih rinci, dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan, kesehatan, dan sosial ekonomi yang lebih spesifik. Implementasi teknologi informasi yang lebih maju juga dapat menjadi fokus, untuk meningkatkan transparansi, monitoring, dan pelaporan dalam koordinasi pemerintahan terkait angkutan batu bara. Dengan demikian, penelitian masa depan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih substansial dalam memperbaiki praktik koordinasi pemerintahan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan di Provinsi Jambi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alayubi, R. (2023). Dominasi Oligarki Sumber Daya Alam: Studi Kasus Ketergantungan Indonesia Terhadap Industri Batu Bara Di Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3).
- Citra, D., Hapsa, H., & Baidawi, A. (2021). Kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi Terhadap Transportasi Angkutan Batu Bara. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 6(2).
- Dewa, M. J., Sinapoy, M. S., Oheo kaimuddin haris, Tatawu, G., Sensus, L., & Arifin. (2023). Kebijakan Hukum Pengelolaan Pertambangan Berbasis Kesejahteraan Masyarakat. *Halu Oleo Legal Research, Volume 5*,(1).
- Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalbah, S. Z., Ratnaningsih, P. W., & E, A. A. M. S. (2022). Media penelitian kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).
- Lahagu, P., Ndraha, A. B., & Halawa, O. (2023). PENGARUH EFIKASI DIRI TERHADAP PERENCANAAN KARIR PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KARIR SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA KANTOR CAMAT MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3).
<https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.390>
- Lubis, M. S. (2022). Hubungan Motivasi Pegawai terhadap Efektivitas Kinerja di Pemerintah Kabupaten Batu Bara. *Langgas: Jurnal Studi Pembangunan*, 1(2). <https://doi.org/10.32734/ljssp.v1i2.9384>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.

Nariendra, P. W., & Juanita, J. (2023). Implementasi Kebijakan Operasional Truk Overloading Di Provinsi Jambi. *Techno (Jurnal Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Purwokerto)*, 24(1).
<https://doi.org/10.30595/techno.v24i1.17213>

Pratama, L. S., Damanik, D., & Mispranoto. (2021). Pengaruh Penyertaan Modal Daerah Terhadap PAD Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1).

Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33).
<https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>

Sari sasi gendro, dea aulya. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *LP2M UST Jogja* (Issue March).

Satoto, S., & Nasution, B. J. (2019). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(1).
<https://doi.org/10.22437/jssh.v3i1.7134>

Thabroni, G. (2022). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh). In *Serupa.Id*.

Wibisono, M. S. (2011). Prediksi Jumlah Emisi Co2 dari Kegiatan Transportasi Khusus Kereta Api dan Upaya teknologi Tersedia Pengurang Emisi. *Lembaran Publikasi Minyak Dan Gas Bumi*, 45(3).

Wijaya, H., Purnawan, P., & Gunawan, H. (2014). PENENTUAN TARIF ANGKUTAN BARANG MODA KERETA API JALUR PADANG-SOLOK. *Jurnal Rekayasa Sipil (JRS-Unand)*, 10(1).
<https://doi.org/10.25077/jrs.10.1.57-67.2014>